



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 164 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PENGEDALIAN
PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Desa yang bersempit dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu untuk membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Desa yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 54);
17. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PENGEDALIAN PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUANTAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring, Evaluasi Dan Pengedalian Pembangunan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Membina Desa dalam pengelolaan keuangan Desa dari bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa;
 - c. Memonitoring, mengevaluasi dan mengendalikan pembangunan Desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) kepada Kepala Desa Perangkat Desa BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Memonitoring dan mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Terhitung Mulai Tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 Maret 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


u. RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala BPKAD Kab. Bangkep di Salakan.
4. Kepala BKPSDM Kab. Bangkep di Salakan.
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR ~~6~~ TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PENGEDALIAN
PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

- Penasehat : - Plt. Bupati Banggai Kepulauan
- Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
- Kejari Banggai Laut
- Kapolres Banggai Kepulauan.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten. Banggai Kepulauan.
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Ketua : Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Banggai Laut.
Wakil Ketua : Kepala Seksi Datun Kejaksaan Negeri Banggai Laut.
Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten
Banggai Kepulauan.
- Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Waka Polres Banggai Kepulauan
4. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan
5. Bendahara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pokja I

- Ketua : Samel Bagilis, S.Sos., MM (Dinas PMD)
Sekretaris : Hariyanto, SE (Dinas PMD)
Anggota : Suwaskito Wibowo, SH., MH (Kejaksaan)
: IPTU. Sukri Larau, SH (Polres Bangkep)
: Zulkifli (BPKAD)
: Abd. Rifai Dg. Pallena, S.IP (Dinas PMD Admin Siskeudes)

Pokja II

- Ketua : Apriyanto Pamolango, S.STP (Dinas PMD)
Sekretaris : Rizal Kaniu T.A PP
Anggota : Yoyok Fiter Haiti Fewu, SH (Kejaksaaan)
: Mahrobin M. Moligay (Dinas PMD)
Rizaldi Salatun, SH (APIP)
Ahmad Jujur Latif, S.STP (Dinas PMD Admin LRA)

Pokja III

Ketua

Sekretaris

Anggota

- : Rahmad Labou, S.STP., M.Ap (Dinas PMD)
- : IPDA. Partono (Polres Bangkep)
- : Amrun Ma'u, SE (Dinas PMD)
- : Moh. Ishak, A.md (APIP)
- : Abd. Jalil Tangkudung (Bag. Hukum)
- : PERS/LSM

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM